

**PENERAPAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KEGIATAN RESES
SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANAH DATAR PADA
PERIODE 2024-2029**

ABSTRAK

Komunikasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesinambungan demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi antara lembaga pemerintah dengan publik, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi isu krusial, terutama di tingkat daerah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada analisis komunikasi publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, yang merupakan salah satu lembaga legislatif yang berperan sebagai pengawas dalam berjalannya pemerintahan daerah, di mana peran digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Komunikasi publik ini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Melalui komunikasi publik yang efektif, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah daerah, sementara DPRD memperoleh masukan dan aspirasi langsung dari konstituen. Salah satu bentuk nyata komunikasi publik tersebut adalah kegiatan reses. Dimana reses merupakan masa dimana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan masyarakat atau konstituen yang diwakilinya. Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait diantaranya: Memperluas penggunaan media komunikasi publik untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung, memprioritaskan aspirasi yang realistis dan sesuai dengan kewenangan DPRD agar proses tindak lanjut yang lebih efektif, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap aspirasi yang telah disampaikan sehingga masyarakat mengetahui progres bantuan, mengoptimalkan dukungan sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan reses, termasuk administrasi, dokumentasi, dan konsumsi peserta.

Kata Kunci : DPRD, Komunikasi Publik, Kebijakan, Kegiatan Reses

**THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMMUNICATION IN RECESS
ACTIVITIES AS A MEMBER OF THE REGIONAL HOUSE OF
REPRESENTATIVES (DPRD) OF TANAH DATAR REGENCY FOR THE
2024–2029 PERIOD**

ABSTRACT

Public communication is one of the main pillars in maintaining democratic sustainability and public participation in governance processes. In the rapidly developing era of digitalization, transformations in information and communication technology have changed interaction patterns between government institutions and the public, enabling faster, more transparent, and more inclusive access to information. However, challenges such as the digital divide and limited infrastructure remain crucial issues, particularly at the regional level in Indonesia. This study focuses on analyzing public communication within the Regional House of Representatives (DPRD) of Tanah Datar Regency, a legislative institution that plays a supervisory role in regional governance, where digitalization has not yet been fully utilized to strengthen community participation. Public communication is an essential element in the implementation of the duties and functions of the DPRD. Through effective public communication, the public can better understand local government policies, while the DPRD can directly receive input and aspirations from its constituents. One concrete form of public communication is the recess activity. Recess is a period during which DPRD members return to their electoral districts to meet directly with the communities or constituents they represent. These activities aim to absorb public aspirations, accommodate community issues, and disseminate various policies formulated by the local government. This final project is expected to provide recommendations for relevant stakeholders, including expanding the use of public communication media to reach communities unable to attend in person, prioritizing realistic aspirations that align with the authority of the DPRD to ensure more effective follow-up, conducting regular monitoring and evaluation of submitted aspirations so the public is informed about progress, and optimizing the support of the DPRD secretariat in organizing recess activities, including administration, documentation, and participant logistics.

Keywords : DPRD, Public Communication, Policy, Recess Activitie